



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiante. 2013. Seri KUP – Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Dalam <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-wajib-pajak-dan-pengusaha-kena-pajak>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2017.
- Budi, Chandra. 2014. Batasan Omzet Pengusaha Kecil Wajib PPN Dinaikkan. Dalam <http://www.pajak.go.id/content/batasan-omzet-pengusaha-kecil-wajib-ppn-dinaikkan>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2017.
- Dewi, D. A. S., Suharso, dan Budiharto. 2012. “Implementasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui Restitusi dan Kompensasi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang”. *Vol. XXIV No. 1, Agustus dan 2012*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Kenali Aturan dalam Pelaporan Pajak. Dalam <http://pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam-pelaporan-pajak>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak. Dalam <http://www.pajak.go.id/content/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak?lang=en>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Seri PPN - Tata Cara Restitusi PPN. Dalam <http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-tata-cara-restitusi-ppn>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Booklet Pajak Pertambahan Nilai. Dalam http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPN_0.pdf. Diakses pada tanggal 17 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Dalam http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab2_0.pdf. Diakses pada tanggal 6 Mei 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Leaflet-penagihan-final2 upload Pajak. Dalam <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/leaflet-penagihanfinal2%20upload.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam <http://www.pajak.go.id/content/2-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2017.

- Ebeke, C. H., 2010. "Remittances, Value Added Tax and Tax Revenue in Developing Countries". *CERDI, Etudes et Documents, E 2010.30, November and 2010.*
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. 2010. *Essentials Of Econometrics Fourth Edition.* New York: McGraw-Hill.
- Halim, A., Bawono, I. R., dan Dara, A. 2016. *Perpajakan.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Herryanto, M., dan Toly, A. A. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". *Tax & Accounting Review Vol. 1, No. 1, 2013.*
- Jusmani dan Qurniawan, R. 2016. "Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat". *Jurnal Media Wahana Ekonomika Vol. 13, No. 3, Oktober dan 2016, 130-142.*
- Kresna, Yohannes. "Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai". *Jurnal Ilmiah Akuntansi. PPI-14, 2014.*
- Liem, S. N., Saerang, D. P. E., dan Wokas, H. 2015. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15, No. 04, 2015.*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.* Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Meiliawati, Anastasia. 2013. "Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi". *Ultima Accounting Vol. 5, No. 1, Juni dan 2013.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.03/2012 Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.03/2013 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2012. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012. Dalam <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/full-nk%20dan%20apbnp%202012.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2013. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2013. Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/Data/apbn-tahun-2013>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2014. Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-apbnp-2014>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015. Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-apbn-p-tahun-2015>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-apbn-p-tahun-2016>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (*Audited*). Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/en/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2013-audited>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (*Audited*). Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/LKPP%20Audited%202014.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (*Audited*). Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/LKPP%202015%20Audited.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Audited*). Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2016>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.
- Nindar, M. R., Pangemanan, S. S., dan Sabijono, H. 2013. “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. *Jurnal EMBA Vol. 2, No. 1, Maret dan 2014, 1-10*.
- Nursanti, I. dan Padmono, Y. Y. 2013. “Pengaruh Self Assessment Sytem dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 1, No. 1, Januari dan 2013*.
- Pohan, C. A. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y. S. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Rahmawati, F. N., Santoso, S., dan Hamidi, N. 2014. “Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta”. *Jupe UNS Vol. 3, No. 1, Juli dan 2014*.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Sadiq, M. LD., Kumadji, S., dan Husaini, A. 2015. "Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7, No. 1, 2015.*
- Samosir, H.H. 2014. Pembayaran Surat Ketetapan Pajak yang Jatuh Tempo pada Hari Libur. Dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20090-pembayaran-surat-ketetapan-pajak-yang-jatuh-tempo-pada-hari-libur>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2017.
- Sapieil, N. S., dan Jeyapalan, K. 2013. "Impacts of the Self-Assessment System for Corporate Taxpayers". *American Journal of Economics 3(2), 75-81.*
- Sari, M. M. R., dan Afriyanti, N. N. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 7, No. 1, Januari dan 2012.*
- Sekaran, U., dan Bougie, R. 2013. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sitio, Rohmasari. 2015. "Pengaruh *Self Assessment System*, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru". *Jom. FEKON Vol. 2, No. 2, Oktober dan 2015.*
- Sukardji, Untung. 2015. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supit, W. M., Saerang, D. P. E., dan Sabijono, H. 2014. "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *Jurnal Emba Vol. 2, No. 3, September dan 2014.*
- Trisnayanti, I. A. I., dan Jati, I. K. 2015. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13, 1 dan 2015, 292-310.*
- Usman, Sarah. 2017. "Restitution and Restitution Examination Managerial Process KPPN Value Added Tax in Manokwari". *Jurnal Nusamba Vol. 2, No. 1, 2017.*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Wulandari, S., Ilat, V., dan Sabijono, H. 2014. “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado”. *Jurnal EMBA Vol. 2, No. 2, Juni dan 2014*.

